

**KEBIJAKAN RASIONALISASI MILITER PADA MASA PEMERINTAHAN  
PERDANA MENTERI MOHAMMAD HATTA  
TAHUN 1948-1950**

Wahyu Hari Setiawan\*)  
Sumarjono\*\*)   
Sugiyanto\*\*\*)  
e-mail : w\_yoe725@yahoo.com

**Abstrak**

*Kebijakan rasionalisasi militer merupakan salah satu kebijakan pemerintahan perdana menteri mohammad hatta tahun 1948. Kebijakan rasionalisasi di dasarkan kepada kondisi indonesia, yakni di bidang militer dan perekonomian. Penelitian ini mendeskripsikan tentang latar belakang pengambilan kebijakan oleh pemerintahan mohammad hatta dan dampak dari pelaksanaan kebijakan rasionalisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Kebijakan rasionalisasi pada dasarnya dimaksudkan untuk membenahi perekonomian indonesia dan berusaha membangun militer yang lebih profesional, dengan cara mengurangi jumlah tentara yang tidak memiliki keahlian dasar di bidang militer dan membenahi struktur organisasi militer indonesia.*

*Kata kunci : Kebijakan, Rasionalisasi, militer.*

**Abstract**

*Military rationalisation policy is one of the policies of Government of Prime Minister Mohammad Hatta in 1948. The policy is based on rationalisation to conditions, namely in field of military and economy. This study describes the background retrieval of policies by the Government of Mohammad Hatta and the impact of the implementation of the policy of rationalisation. This research uses the methods of historical research. Policy rationalisation is basically intended to restructure the Indonesian economy and the military is trying to build a more professional, by way of reducing the number of soldiers who do not have basic skills in the field of military and restructure the organisational structure of the Indonesian military.*

*Key word: policy, rationalisation, military.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia, sebagai negara yang baru merdeka, sangat membutuhkan adanya kekuatan militer, yang berfungsi sebagai kekuatan yang memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan negara dari berbagai serangan yang mengancam kedaulatan negara. Kondisi militer Indonesia, pada masa awal

kemerdekaan masih belum mengarah pada profesionalisme dan dengan kondisi tersebut, akan sulit bagi Indonesia untuk menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa dan negara, oleh karena itu, diperlukan militer yang kuat dan tangguh Menurut Fattah (2005:13) militer yang profesional adalah militer yang memiliki kemahiran khusus dalam bidang ketentaraan, yaitu pertahanan negara atau perang melawan musuh yang mengancam kedaulatan dan integritas negara, serta keahlian dalam mengendalikan kekerasan, secara langsung ataupun tidak langsung. Bagi negara yang masih baru merdeka, kekuatan militer yang profesional, harus diwujudkan baik secara organisasi, personel, dan persenjataan.

Pemerintah berusaha mewujudkan militer yang profesional, dengan melaksanakan kebijakan rasionalisasi. Rasionalisasi di bidang militer, dilakukan dengan dua jalan, yakni mengurangi jumlah anggota tentara yang ada, dan sekaligus membenahi struktur organisasi dalam tubuh militer. Pemerintah berusaha mengurangi jumlah anggota tentara, dimaksudkan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan jumlah tentara, di dalam wilayah Indonesia yang luasnya semakin berkurang akibat Perjanjian Renville, serta melakukan penghematan anggaran terhadap organisasi militer. Menurut Nasution (1968:130) organisasi dan kekuatan TNI harus diperkecil dan disederhanakan, supaya lebih efektif sesuai dengan keadaan dan posisi Republik Indonesia pada masa itu, selain geografis daerah Republik Indonesia yang semakin sempit, penderitaan sosial, dan ekonomi yang menjadi faktor penting. Negara dan masyarakat sudah tidak mungkin lagi harus membiayai terus-menerus kurang lebih 350.000 tentaranya dan ditambah 470.000 orang laskar Biro Perjuangan.

Kebijakan rasionalisasi yang telah berhasil dilaksanakan akan berdampak terhadap pembangunan negara, dimana pembangunan yang menjadi program pemerintah dan secara langsung akan melibatkan para pemuda-pemuda Indonesia. Para pemuda yang mayoritas merupakan bekas tentara, kemudian dikumpulkan dan diberi pembinaan oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Dibentuknya Kementerian Pembangunan dan Pemuda ini bertugas untuk menyediakan lahan-lahan pekerjaan bagi seluruh masyarakat, khususnya kepada para anggota tentara yang terkena dampak rasionalisasi. Menurut Hatta (1953) Program ini merupakan salah satu tujuan yang terpenting. Gabungan program pembangunan dan masalah pemuda dinyatakan sebagai perlambang, bahwa pembangunan negara akan disemangati oleh jiwa pemuda yang riang gembira dan suka bertindak. Kementerian Pembangunan dan Pemuda, sementara mendapat tugas untuk menampung sebagian dari pemuda-pemuda yang dikeluarkan dari tentara dan mengusahakan supaya mereka dapat dikerahkan pada pekerjaan yang kreatif dan juga memberi latihan untuk mempelajari berbagai kepandaian. Dalam pemilihan pekerjaan bagi para tentara, lebih diutamakan ke jurusan dalam pembuatan perumahan, pakaian dan menghasilkan makanan.

Fokus permasalahan dalam tulisan ini adalah (1) latar belakang pemerintah mengambil

kebijakan rasionalisasi, (2) dampak dari pelaksanaan kebijakan rasionalisasi. Secara spasial, kebijakan rasionalisasi lebih difokuskan ke wilayah Republik Indonesia, khususnya daerah pulau Jawa. Ruang lingkup temporal dalam penelitian ini dimulai sejak tahun 1948 sampai tahun 1950. Tujuan dari penelitian ini adalah, 1) Menjelaskan kondisi Republik Indonesia sehingga pemerintah melakukan rasionalisasi di bidang militer; dan 2) Menjelaskan dampak dari dikeluarkannya kebijakan rasionalisasi militer pada masa pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Hatta 1948-1950.

Isi dalam artikel ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat diantaranya, 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan sejarah mengenai kebijakan rasionalisasi militer pada masa pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Hatta, 2) Bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat mengetahui secara jelas mengenai kebijakan rasionalisasi militer pada masa pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Hatta, 3) Bagi almamater, melakukan salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian, dan 4) Bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan rasionalisasi militer pada masa pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Hatta.

Artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari proses heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penulis menggunakan pendekatan politikologis dalam artikel. Menurut Kartodirdjo (1992:4) menyatakan pendekatan politikologis merupakan pendekatan yang menyoroti kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan dan lain sebagainya. Pendekatan politikologis dalam penelitian ini digunakan untuk dapat melihat perkembangan jalannya kebijakan rasionalisasi militer serta hambatan-hambatan yang dihadapi didalamnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang Kebijakan Rasionalisasi Pada Masa Pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Hatta Tahun 1948**

Faktor-faktor yang mendorong pemerintah untuk mengadakan rasionalisasi di bidang militer di dasarkan kepada 2 faktor, yaitu kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk dan usaha untuk membangun organisasi militer yang profesional.

#### **1. Menurunnya Perekonomian Indonesia**

Pada awal menjabat sebagai Perdana Menteri, Mohammad Hatta, pemerintah berusaha menata kembali perekonomian yang masih mengalami kekacauan, yang merupakan dampak dari perang kemerdekaan melawan pasukan Belanda, yang berujung rusaknya sebagian besar infrastruktur-infrastruktur yang menunjang perekonomian Indonesia, seperti bangunan-bangunan pabrik dan

terjadinya inflasi yang sangat tinggi. Kondisi yang terjadi tersebut membuat usaha-usaha yang dilakukan pemerintah guna membangun kembali Indonesia dengan memperbaiki perekonomian terhambat, ditambah dengan adanya serangan dari pihak Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia. Semua perusahaan dagang dan perkebunan-perkebunan yang menghasilkan pemasukan bagi kas negara, perlahan-lahan dapat diambil alih oleh pihak Belanda. Diadakannya Perjanjian Renville, pihak Belanda berusaha menguasai daerah-daerah yang sangat vital bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Indonesia kehilangan daerah-daerah yang subur, yang mampu menghasilkan padi secara berlebih-lebih, seperti daerah Jawa Barat dan Jawa Timur, selain itu, Indonesia juga kehilangan pabrik-pabrik tekstil yang dikuasai oleh Belanda (Hatta 1953:11).

Pasca diadakannya Perjanjian Renville, Belanda meningkatkan blokade laut dan udara terhadap kegiatan perdagangan ekspor dan impor Indonesia. Blokade yang dilakukan Belanda menambah sulitnya kehidupan masyarakat dan menambah kesengsaraan yang diderita oleh rakyat. Blokade yang dilakukan oleh Belanda pada dasarnya telah dilakukan sejak bulan November 1945, dan Letnan Gubernur Jenderal Belanda kemudian meresmikan blokade melalui surat keputusan pada tanggal 29 Januari 1947. Blokade yang dilakukan oleh Belanda, dimaksudkan untuk mencegah masuknya alat persenjataan; mencegah keluarnya barang-barang milik perkebunan; dan melindungi bangsa Indonesia dari perbudakan yang dilakukan oleh negara lain. Blokade yang dilakukan oleh Belanda pada dasarnya bertujuan untuk memperlemah kekuatan Republik Indonesia melalui lapangan ekonominya (Djojohadikusumo 1951:16).

Kuatnya blokade yang dilakukan oleh Belanda, membuat pemerintah berusaha untuk menembus blokade tersebut, karena dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara dan menambah jumlah keuangan kas negara, pemerintah masih bergantung terhadap perdagangan ekspor dan impor barang. Usaha menembus blokade dipusatkan di Sumatera, dengan tujuan utama pengiriman ke Singapura dan Malaya. Usaha pemerintah dilakukan dengan menggunakan perahu layar dan kapal motor cepat, dikarenakan jarak perairan yang dilalui sangat dekat. Pelaksanaan penembusan blokade Belanda dilakukan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia dengan dibantu oleh pemerintah. Sejak tahun 1947, pemerintah membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama *Indonesia Office (Indoff)*. *Indoff* merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia fungsi *Indoff* adalah pengendali usaha penembus blokade dan usaha perdagangan barter. Badan perwakilan ini dipimpin oleh Mr. Oetojo Ramlan dan dibantu oleh beberapa orang anggota stafnya, seperti Soerjono Daroesman, Mr. Zairin Zain, Thaharudin Ahmad, Dr. Soeroso dan Tamtomo (Poesponegoro dan Notosusanto 1984:177).

Pemerintah tetap berusaha meningkatkan dan memperbaiki perekonomian Indonesia yang

sedang mengalami kekacauan, di tengah-tengah blokade yang dilancarkan oleh Belanda. Pemerintah mengusahakan cara yang lain untuk mewujudkannya, diantaranya, 1) Mengurangi pengeluaran Negara; 2) Memperbesar masuknya pajak; 3) Memperbesar produksi; dan 4) Mengadakan sanering uang (mengurangi jumlah nilai mata uang) berhubung dengan banyaknya uang palsu beredar dan dengan merosotnya nilai mata uang Indonesia (Hatta 1953:13).

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu untuk membenahi perekonomian Indonesia. Adanya blokade yang dilakukan oleh pihak pemerintah kolonial Belanda terhadap Indonesia, menjadi suatu permasalahan yang cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam negeri, tetapi pemerintah mengusahakan agar perdagangan dengan luar negeri tetap berjalan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah yang tidak hanya bergerak dibidang pembangunan perekonomian Indonesia.

Perkembangan perekonomian sejak awal kemerdekaan sampai tahun 1950, masih menunjukkan kondisi yang belum stabil, meskipun sejak tahun 1948, Indonesia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang memiliki kemampuan atau keahlian dibidang perekonomian, belum mampu membuat kondisi Indonesia menjadi lebih baik dan dengan kondisi adanya blokade dari Belanda, usaha pemerintah untuk membenahi perekonomian Indonesia akan sangat sulit, ditambah Indonesia hanya mengandalkan hasil perkebunan dan pertanian. Pada dasarnya kondisi perekonomian Indonesia akan mejadi lebih baik, jika indonesia sudah mampu terlepas dari pendudukan dan blokade yang dilakukan oleh Belanda.

## **2 Membangun Kekuatan Militer Indonesia**

Usaha pemerintah dalam membentuk organisasi militer yang mampu menjaga keamanan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, telah dilakukan sejak awal kemerdekaan Indonesia. pemerintah menyadari akan kekuatan militer yang tidak kuat dan belum terorganisir, maka pada tanggal 22 Agustus 1945, pemerintah membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat), dan dengan terbentuknya BKR, membuat para pemuda kecewa. Para pemuda mengharapkan terbentuknya tentara nasional yang mampu menjaga keamanan seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya terpusat di daerah-daerah. Para pemuda yang kecewa terhadap keputusan pemerintah dengan mendirikan BKR, membuat para pemuda mengambil langkah dengan membentuk laskar-laskar perjuangan. Pembentukan laskar-laskar rakyat pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan mempertahankan daerah pedesaan terhadap musuh, menjaga keamanan daerah pedesaan, membantu segala kepentingan rakyat yang membutuhkan banyak tenaga dan yang teratur, Selain bersifat lokal, umumnya keberadaan laskar rakyat kurang terorganisir (Maarif 2011:8).

Pemerintah RI menyadari perlunya memperkuat keamanan secara umum, maka secara berurutan, pemerintah membentuk TKR (Tentara Keamanan Rakyat), kemudian TRI (Tentara Republik Indonesia), dan setelah itu, pemerintah kemudian membentuk TNI (Tentara Nasional Indonesia), yang sebenarnya telah diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. TNI merupakan penggabungan dari 2 (dua) Angkatan Perang, yaitu TRI dan Laskar-laskar perjuangan, namun dengan terbentuknya tentara nasional masih memunculkan keraguan terhadap jiwa profesionalisme para tentara. Para tentara yang sebagian besar berasal dari pasukan laskar-laskar perjuangan dan tidak memiliki keahlian dasar di bidang militer, selain itu dalam struktur organisasi militer perlu diadakannya perbaikan dan alat-alat persenjataan yang dimiliki masih kurang memadai, jadi adanya pengadaan alat persenjataan secepatnya harus dilaksanakan, sehingga dapat terbentuk suatu organisasi militer yang kuat dan dapat menandingi kekuatan militer Belanda.

Pengadaan peralatan persenjataan militer Indonesia, merupakan suatu permasalahan yang sangat sulit dilakukan pemerintah ditengah-tengah blokade yang dilakukan Belanda, tetapi pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan membentuk perwakilannya di luar negeri yang disebut Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) dan dipimpin oleh Ali Jayengprawiro, yang sekaligus dibantu oleh Suhardjo, Harmono, Kusmardjo, Ferdy Salim dan Darry Salim. Tugas pokok dari badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan perang, serta memasukkannya ke wilayah Republik Indonesia. pelaksana dalam penembusan blokade Belanda dilakukan oleh John Lie, O.P.Koeno, Ibrahim Saleh dan Chris Tampenawas. (Poesponegoro dan Notosusanto 1984:177-178).

Jumlah anggota tentara yang banyak, membuat pemerintah berupaya memperkecil dan menyederhanakan, supaya lebih efektif sesuai dengan keadaan dan posisi Republik Indonesia pada masa itu, selain geografis daerah Republik Indonesia yang semakin sempit, penderitaan sosial, dan ekonomi yang menjadi faktor penting, setelah terlaksananya Perjanjian Renville dan menyebabkan sebagian wilayah Republik Indonesia berada di tangan Belanda. Negara dan masyarakat sudah tidak mungkin lagi harus membiayai terus-menerus kurang lebih 350.000 tentaranya dan ditambah 470.000 orang laskar Biro Perjuangan (Nasution 1968:130).

Seiring dengan keputusan pemerintah untuk mengurangi jumlah anggota tentara, pemerintah juga berusaha mengurangi jumlah kesatuan-kesatuan militer yang ada, di wilayah Sumatera terdapat 6 (Enam) Divisi dan di wilayah Jawa, terdapat 7 (Tujuh) Divisi, diantaranya 1) Divisi I/Siliwangi yang memiliki 5 Brigade, yakni Brigade I/Tirtayasa; Brigade II/Suryakencana; Brigade III/Kian Santang;; Brigade VI/Guntur; Brigade V/Sunan Gunung Jati; 2) Divisi II/Sunan Gunung Jati memiliki 2 Brigade, yakni Brigade di Cirebon dan Brigade di Purwokerto; 3) Divisi III/Dipenogoro di Yogyakarta memiliki

3 Brigade, yakni Brigade Nusantara di Pekalongan; Brigade Mataram di Purworejo; dan Brigade Joko Untung di Yogyakarta; 4) Divisi IV/Panembahan Senopati di Solo (Surakarta); 5) Divisi V/Ronggo Lawe di Cepu; 6) Divisi VI/Narotama di Mojokerto; dan 7) Divisi VII/Surapati di Malang (Pusat Sedjarah Militer AD 1969:65-66).

Kementerian Pembangunan dan Pemuda kemudian dibentuk oleh pemerintah untuk menampung dan menunjang anggota-anggota yang terkena rasionalisasi, disamping itu, untuk menindak lanjuti kebijakan rasionalisasi, Perdana Menteri Mohammad Hatta menjalankan 3 (tiga) kebijakan untuk memobilisasi para tentara yang terkena rasionalisasi, antara lain: Melepaskan mereka yang sukarela mau meninggalkan tentara, diantaranya ada yang ingin kembali pada pekerjaannya yang lama sebagai guru, sebagai pertikelir, dan lain sebagainya; Menyerahkan mereka kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda yang menyiapkan objek-objek usaha bagi mereka; dan Mengembalikan seratus ribu tentara kembali ke dalam masyarakat desa (Hatta 1953:16).

Usaha pemerintah untuk menampung dan menunjang anggota-anggota yang akan terkena rasionalisasi itu, diadakanlah Kementerian Pembangunan dan Pemuda yang dipimpin oleh Pemuda Supeno. Untuk keperluan tersebut dikeluarkan Penetapan Pemerintah No.3, yang mengatur tentang penempatan tenaga dan tunjangan kepada bekas tentara setelah dirasionalisasi, dan untuk keperluan penyelesaian rasionalisasi Angkatan Perang, maka para anggota tentara yang diberhentikan dari jabatannya karena rasionalisasi itu sebagian dikembalikan ke desanya masing-masing dan ada juga yang dipekerjakan di perusahaan-perusahaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Para tentara yang langsung dikembalikan ke desanya masing-masing diberi tunjangan untuk sekaligus dan satu kali saja sebesar 6 (enam) kali jumlah gaji pokok sebulannya dengan pembatasan, sekurang-kurangnya Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)” (Nasution 1978:131-132).

Berdasarkan pernyataan di atas, disebutkan bahwa tunjangan yang didapatkan para tentara yang terkena rasionalisasi adalah sebesar 6 (enam) kali gaji pokok setiap bulannya, jadi diperkirakan pada setiap bulannya tentara mendapatkan gaji kurang lebih sekitar Rp 50,- dan dengan jumlah tentara yang telah dikurangi menjadi 160.000 termasuk 57.000 tentara regular, maka setelah terlaksananya rasionalisasi, pemerintah menganggarkan dana sekitar kurang lebih Rp 8.000.000,- setiap bulannya untuk gaji tentara, dibandingkan dengan sebelum terlaksananya rasionalisasi, pemerintah menganggarkan Rp 41.000.000,-, dengan kondisi demikian pemerintah telah menghemat anggaran untuk gaji tentara sebesar Rp 33.000.000,- yang dapat dianggarkan untuk pengadaan alat persenjataan ataupun bidang lainnya, misalkan bidang pertanian, perikanan, perindustrian, dan berbagai bidang lainnya yang hasilnya dapat menambah keuangan kas negara.

Membentuk organisasi militer yang profesional sangat penting dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Pemerintah dalam mewujudkan organisasi militer yang profesional melakukan pembenahan terhadap struktur organisasi militer dan mengurangi jumlah anggota tentara, khususnya di daerah Jawa. Reorganisasi dalam tubuh organisasi militer dimaksudkan untuk merubah susunan struktur organisasi militer, yang sebelumnya Angkatan Perang yang ada, seakan berdiri sendiri, seperti Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Pemerintah dengan program reorganisasi, berusaha menempatkan para tentara yang berpengalaman dalam bidang militer di dalam tubuh struktur organisasi, agar koordinasi antara pimpinan militer dan prajurit dapat terlaksana dengan baik.

### **Dampak dari kebijakan Rasionalisasi**

Pemerintah menghadapi berbagai kesulitan psikologis, setelah diadakannya rasionalisasi di kalangan tentara. Rakyat masih hidup di tengah-tengah situasi peperangan, tentara dan laskar-laskar masih merasa memiliki kewajiban dalam mempertahankan tanah air, dalam situasi demikian, sangat mudah mendapatkan pemikiran yang salah mengenai rasionalisasi, masyarakat memaknai rasionalisasi adalah pengurangan jumlah tentara berarti melemahkan tentara dan jasanya tidak dihargai, tetapi sebenarnya, pemerintah tetap menghargai jasa para tentara dalam perjuangan, dan tidak melupakan segala yang telah dikorbankan untuk mempertahankan negara dan tanah air. Usaha pemuda dalam membangun negara tidak hanya terletak pada pembelaan negara saja, masih lapangan pekerjaan yang dapat menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang besar (Hatta 1953:15).

Pasca diadakannya rasionalisasi di bidang militer, jumlah tentara yang awalnya 350.000 tentara regular dan 470.000 laskar-laskar perjuangan (untuk daerah Jawa) dan membuat perjuangan dirasakan sangat tidak efektif di dalam wilayah Indonesia yang hanya tinggal sepertiga Pulau Jawa. Pemerintah mengurangi jumlah tentara, hingga jumlahnya tersisa 160.000 termasuk di dalamnya 57.000 pasukan prajurit inti (reguler), untuk wilayah Jawa. Jumlahnya tentara yang sedemikian pembiayaan untuk militer tidak akan terlalu memberatkan beban pemerintah, di samping akan terciptanya kesatuan komando dan pimpinan angkatan perang, sehingga akan tercipta suatu koordinasi yang baik antar kesatuan-kesatuan tentara dan pengalaman pahit pada Agresi Militer Belanda, bulan Juli 1947 tidak akan terulang, di mana kondisi tersebut di akibatkan organisasi militer yang tidak terorganisir dan terkoordinir (Muhaimin 1982:52).

Tidak hanya jumlah tentara yang harus dikurangi, dalam usaha mengefektifkan organisasi militer, tetapi juga kesatuan-kesatuan akan dikurangi. Daerah Sumatera, yang awalnya terdapat 6 (enam) Divisi, dikurangi menjadi 3 (tiga) Divisi, sedangkan untuk daerah Jawa, yang awalnya berjumlah 7 (tujuh) Divisi dan kemudian dikelompokkan yang terbagi menjadi 4 (empat) Divisi yang

memiliki tugas masing-masing, yakni Divisi I yang terdiri dari Divisi II/Sunan Gunung Jati dan Divisi Diponegoro, bertugas untuk mempertahankan wilayah barat; Divisi II, yang terdiri dari Divisi VI/Panembahan Senopati dan Divisi V/Ronggo Lawe, bertugas untuk mempertahankan wilayah utara; Divisi III, yang terdiri dari sebagian pasukan Divisi V/Ronggo Lawe, Divisi VI/Narrotama, dan Divisi VII/Surapati untuk mempertahankan wilayah timur, dan Kesatuan Reserve Umum yang berasal dari Divisi Siliwangi (Nasution 1989:23).

Pertentangan politik yang terjadi semakin meningkat sampai terjadi insiden bersenjata di solo. Insiden terjadi antara TNI dan Tentara Laut RI, setelah terjadinya insiden di solo, pada tanggal 18 September 1948, tokoh-tokoh PKI memproklamkan Republik Sovyet Indonesia dan kemudian melakukan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan yang terjadi membuat pemerintah melakukan tindakan dengan mengadakan Gerakan Operasi Militer (GOM) (Poesponegoro dan Notosusanto 1984:155).

Kesatuan-kesatuan tentara dengan tertib dan teratur bergerak menuju Madiun, dari berbagai arah. Tentara yang bergerak dari timur, terdiri dari 3 (tiga) batalyon, yaitu : Batalyon Mujayin dan Sabirin Muchtar yang bergerak dari Trenggalek menuju Ponorogo; Batalyon Gabungan dipimpin oleh Major Sabarudin, bergerak melalui Sawahan menuju Dungus-Madiun; Batalyon Sunarjadi melalui Wilangan dan Saradan menuju Kota Madiun, sedangkan Kesatuan-kesatuan yang bergerak dari arah barat Karesidenan Madiun, bergerak melalui Tawangmangu-Sragen-Plaosan, dan digerakkan juga Brigade Siliwangi untuk mengimbangi usaha penumpasan pemberontakan PKI. Brigade Siliwangi dipimpin oleh Letnan Kolonel Sadikin, yang terdiri dari 5 (Lima) Batalyon, yaitu Batalyon Achmad Wiranatakusumah, batalyon Umar Wirahadikusumah, Batalyon Dieng, Batalyon Nasuhi, Batalyon Kusno, dan Kompi Taruna Akademi Militer (Pusat Sedjarah Militer AD 1969:178-179).

Gerakan satuan-satuan TNI mampu menduduki Madiun kembali dalam waktu 12 hari. Pada tanggal 30 September 1948, kira-kira pukul 16.30 pasukan-pasukan Siliwangi mampu menguasai wilayah kota Madiun, tidak ada perlawanan dari pihak PKI, para pemberontak kemudian melarikan diri ke arah Dungus, daerah sekitar Gunung Wilis, sedangkan para pemberontak yang berusaha melarikan diri ke arah Semarang berhasil digagalkan, termasuk diantaranya pemimpinnya, yaitu Musso dan Amir Syarifudin beserta Suripno berhasil ditangkap dan kemudian ditembak mati di daerah Solo (Pusat Sedjarah Militer AD 1969:179)

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dijabarkan dalam pembahasan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yang sekaligus menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, kebijakan

Kebijakan rasionalisasi militer ini, didasarkan pada dua hal, yakni kondisi militer dan perekonomian Indonesia. Kondisi militer Indonesia pada masa awal kemerdekaan dengan jumlah anggota tentara yang sangat banyak, khususnya daerah Jawa dirasakan sangat tidak efektif untuk dapat dikatakan sebagai tentara yang profesional. Perekonomian Indonesia juga wajib mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah, karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup rakyat. Anggaran dana yang dikeluarkan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan militer ditambah dengan keadaan kas negara yang semakin berkurang, akibat dari banyaknya pengeluaran dibandingkan pendapatan negara.

Ke dua, Pemerintah menyadari perlunya memiliki sebuah organisasi militer yang profesional dan membangun kekuatan militer yang banyak mendapatkan tantangan dari luar maupun dari dalam. Kondisi yang demikian, kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan mengurangi jumlah anggota tentara yang sangat banyak. Jumlah anggota tentara yang kurang lebih sekitar 470.000 pasukan Biro Perjuangan dan 350.000 tentara dirasakan sangat tidak efektif, maka pemerintah mengurangi jumlah tentara dan hanya menginginkan sekitar 160.000 tentara, di dalamnya termasuk 57.000 tentara inti. Kebijakan rasionalisasi ini banyak mendapatkan kecaman dan menimbulkan kekecewaan di kalangan tentara. Para tentara beranggapan bahwa perjuangan yang dilakukan selama ini untuk kemerdekaan Indonesia seakan-akan tidak dihargai, dalam setiap pengambilan keputusan, selayaknya tidak menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak yang bersangkutan, meskipun keputusan yang diambil merupakan sesuatu hal yang terbaik dan seandainya ada pihak yang merasa dirugikan, jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga tidak menimbulkan adanya pemberontakan, seperti yang terjadi pada pemberontakan FDR/PKI, yang pada dasarnya disebabkan oleh adanya kebijakan-kebijakan yang menyebabkan kerugian pada pihak-pihak yang bersangkutan

Saran penulis yaitu bagi mahasiswa dan calon guru sejarah, dapat mempelajari perkembangan organisasi militer, khususnya Indonesia. Dengan mempelajari perkembangan militer kita dapat mengetahui dengan benar perkembangan militer Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia; bagi Almamater, hendaknya mau memberikan peluang untuk penelitian di bidang sejarah militer Indonesia yang akan membawa dampak terhadap rasa cinta tanah air, bangsa dan negara; bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perkembangan militer Indonesia, khususnya mengenai masalah kebijakan rasionalisasi militer.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Djojohadikusumo, S. 1951. *Bunga Rampai Ekonomi*. Jakarta : Penerbit Indira.
- [2] Fattah, A. 2005. *Demiliterisasi Militer*. Yogyakarta : PT LKIS

- [3] Hatta, M. 1953. *Mendajung Antara Dua Karang*. Djakarta : Kementerian Penerangan Republik Indonesia.
- [4] Kartodirjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : PT. Gramedia.
- [5] Maarif, S. 2011. *Militer Dalam Parlemen 1960-2004*. Jakarta : Prenada Media Group.
- [6] Muhaimin, Y. A. 1982. *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- [7] Nasution, A. H. 1968. *Tentara Nasional Indonesia 2*. Djakarta : Seruling Masa.
- [8] Nasution, A. H. 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 7 ( Periode Renville )*. Bandung : Disjarah AD dan Angkasa.
- [9] Nasution, A. H. 1989. *Memenuhi Panggilan Tugas ( Kenangan Masa Gerilya )*. Jakarta : CV Haji Mas agung.
- [10] Poesponegoro, M. D., dan Notosusanto, N. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : Balai Pustaka.
- [11] Pusat Sedjarah TNI AD.. 1969. *Sedjarah TNI AD 1945-1965*. Bandung : Pusat Sedjarah TNI AD.